

ABSTRAK

Pengadaan tanah merupakan hal yang penting bagi penyediaan tanah untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar terselenggara dengan baik, pelaksanaan pengadaan tanah harus didasarkan pada asas-asas yang ditentukan dalam UU Pengadaan Tanah. Namun, asas-asas pengadaan tanah pada realitasnya sering tidak terimplementasi dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan bagi orang yang terkena dampak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas kesejahteraan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery* di Kabupaten Tuban dan peran pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pasca pemberian ganti kerugian.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah non-doktrinal (yuridis empiris), spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, jenis data berupa data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kesejahteraan dalam pengadaan tanah dalam proyek pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery* belum terimplementasi sesuai yang dimaksudkan UU Pengadaan Tanah. Hal tersebut dapat dilihat dalam realitas bahwa banyak orang yang terkena dampak yang justru menjadi pengangguran karena kehilangan tanah untuk digarap. Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di sekitar proyek kilang minyak baru sebatas pemantauan dan evaluasi program CSR dari PT PRPP.

Kata Kunci: *Pengadaan tanah, asas kesejahteraan, kepentingan umum, peran pemerintah, mata pencaharian*